

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas bagi setiap organisasi baik organisasi privat maupun organisasi publik non pemerintah termasuk organisasi Gereja sangat dibutuhkan. Setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat.

Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik (Jasmin dan Luther 2010). Menurut Mursidi (2009) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kepercayaan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas menjadi tanggung jawab individu maupun kelompok kepada para *stakeholder* (Jemaat Gereja, Majelis Gereja). Desakan dari para *stakeholder* akan pentingnya pelaksanaan di dalam setiap manajemen organisasi merupakan fenomena yang harus dicermati oleh setiap organisasi agar organisasi tersebut dipercaya oleh para *stakeholder*.

Organisasi Gereja adalah salah satu organisasi publik non pemerintah pada bidang keagamaan. Era demokrasi sekarang ini akuntabilitas menjadi kebutuhan

dan keharusan dalam rangka pelaksanaan tugas Gereja yaitu *Koinonia* (Persekutuan), *Marturia* (Kesaksian), *Diakonia* (Pelayanan). *Koinonia* berarti persekutuan yang mengandung pengertian berbagi sesuatu dengan seseorang. *Marturia* adalah bentuk kesaksian yang dilakukan melalui Pekabaran Injil. *Diakonia* berorientasi dengan melakukan pelayanan kepada Jemaat Gereja (Moderamen GBKP 2010). Hal ini sejalan dengan perkembangan, kompleksitas dan dinamika organisasi GBKP serta tuntutan jemaat yang semakin kritis.

Menurut Setiawan (2013) pertumbuhan gereja merupakan suatu kerinduan bagi setiap gereja. Setiap gereja memiliki keinginan agar gerejanya mengalami pertumbuhan yang sehat. Gereja secara organisasi didefinisikan sebagai badan atau organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran dan tata ibadahnya. Gereja dikatakan bersifat keagamaan karena secara jelas dan nyata menggunakan agama sebagai salah satu dasar sendirinya (Kabuhung, 2013). Dan gereja berdiri untuk kepentingan agama, sehingga gereja merupakan salah satu pusat keagamaan. Guna menjalankan fungsinya sebagai sarana ibadah, gereja harus menyediakan prasarana dan infrastruktur yang mendukung terciptanya ibadah yang khusyuk, sehingga komunikasi secara vertikal (komunikasi antaraumat dengan Tuhan) dapat berlangsung khidmat. Selain berfungsi sebagai sarana ibadah secara vertikal, gereja juga wajib menciptakan iklim yang kondusif bagi terselenggaranya komunikasi secara horizontal. Komunikasi horizontal yang dimaksud, menyangkut tentang hubungan kasih antar sesama umat manusia.

Untuk mendukung terbentuknya hubungan kasih antar umat kristiani dalam gereja, diperlukan penyelenggaraan aktivitas – aktivitas dalam gereja yang melibatkan ke ikutsertaan umat. Aktivitas – aktivitas tersebut misalnya : perayaannatal bersama, perayaan paskah, perayaan ulang tahun gereja, dan pelaksanaan sekolah minggu gereja. Pelaksanaan aktivitas gereja, baik yang terkait dengan aktivitas untuk menciptakan sarana ibadah yang kondusif, ataupun aktivitas untuk mempererat hubungan antar umat gereja. Pembiayaan operasional gereja ini dapat dilakukan ketika gereja memiliki pendapatan yang cukup. Pendapatan gereja dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya : persembahan umat, persembahan, donatur, aksi sosial natal, aksisosial paskah.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan (Ribka, 2013).

GBKP Perumnas Simalingkar termasuk salah satu Gereja yang besar di kota Medan. Letaknya yang strategis, mudah dijangkau, dan melakukan tiga kali ibadah (pagi, siang, malam) setiap Minggu. GBKP Perumnas Simalingkar termasuk gereja yang bentuk akuntabilitas keuangan sudah dilaksanakan secara transparan. Hal ini terbukti dengan sudah dipublis secara detail laporan

penerimaan dan pengeluaran setiap Minggu dan hasil laporan secara keseluruhan dimuat dalam laporan keuangan setiap tahun.

Secara keseluruhan sebelum melaksanakan kegiatan untuk setiap harinya, sebelumnya sudah ditetapkan anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk masing-masing bidang. Anggaran yang ditetapkan berdasarkan persentase dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 10%. Anggaran yang sudah ditetapkan belum seluruhnya mencapai target hal ini dapat terbukti dari jumlah penerimaan yang masih kecil di banding target dan jumlah pengeluaran yang besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Hal ini terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Rencana Pedapatan dan Pengeluaran serta Realisasi

No	Rencana Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rencana Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran
1	912.620.000	858.033.142	912.620.000	982.194.269

Sumber: Olahan Data Laporan Keuangan GBKP Perumnas Simalingkar

Pada tahun 2012 GBKP Perumnas Simalingkar sumber penerimaan dan pengeluaran kas defisit sebesar Rp. 124.161.127. Hal ini terjadi karena anggaran penerimaan yang besar namun realisasi kecil dan anggaran realisasi pengeluaran yang besar namun realisasi lebih besar dari anggaran. Namun secara nyata, kegiatan oprasional Gereja masih berlangsung secara lancar hal ini dibantu dengan penggunaan saldo kas umum di tahun sebelumnya. Majelis Gereja harus lebih memperhatikan kendala-kendala dalam pencapaian pendapatan yang besar dan meminimkan pengeluaran.

Sebagai organisasi nirlaba, gereja memiliki kewajiban untuk mengelola pendapatan sehingga operasional dapat berlangsung dengan baik. Pengelolaan pendapatan gereja dikatakan sukses apabila gereja mampu memanfaatkan pendapatannya untuk membiayai semua operasional sehingga akan diperoleh laporan penerimaan dan pengeluaran yang tidak defisit. Akan lebih baik ketika gereja mampu menciptakan laporan keuangan yang surplus. Keadaan keuangan surplus bagi gereja sangat penting, karena terkait dengan pengumpulan modal untuk melakukan perbaikan.

Sebagai feedback dari penerimaan pendapatan, gereja berkewajiban melakukan pelaporan kepada umat sebagai bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas secara *financial* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (individu) bertanggungjawab (Mardiasmo, 2004). Dengan melihat pengertian tersebut, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pemegang amanat (gereja) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (umat/donatur) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, sehingga transparansi laporan keuangan tercapai. Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaan transaksi keuangan dalam bentuk pelaporan. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak di luar perusahaan atas posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan selama suatu periode tertentu. Pelaporan keuangan ini perlu dilakukan

untuk menilai seberapa besar tanggungjawab bendahara dalam menciptakan informasi keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan bisa menjadi sarana yang konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Muslim dan Puryanto 2006) .Laporan keuangan juga dapat membantu Jemaat untuk lebih mengetahui keadaan keuangan Gereja tersebut.

Penelitian mengenai akuntabilitas gereja telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yaitu: Jannet (2011) meneliti tentang akuntabilitas dalam perspektif gereja protestan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa akuntabilitas dalam pelaporan keuangan gereja bukanlah hal yang penting dikarenakan adanya konflik kepentingan diantara umat dan majelis serta adanya prinsip kepercayaan dari pemerintah kepada lembaga keagamaan sebagai penyambung tangan Tuhan. Penelitian Randa (2010) mencoba memahami Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Organisasi Gereja Katolik. Penelitian ini menemukan tiga konsep dalam akuntabilitas Gereja. Ditemukan bahwa terdapat praktik akuntabilitas yang meliputi Akuntabilitas Spiritual, Akuntabilitas Kepemimpinan, dan Akuntabilitas Keuangan.

Berdasarkan obyek penelitian, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal: Pertama, Penelitian ini dilakukan di Gereja Protestan yang mempunyai otonomi Gereja tersendiri sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di pada Gereja Katolik yang mempunyai struktur organisasi sentralik (Randa, 2010). Kedua, Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Etnografi. Pendekatan Etnografi adalah pendekatan yang berfungsi

untuk menemukan dan menggambarkan kondisi tertentu yang terus berkembang. Alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu untuk mengamati fenomena-fenomena konseptual subjek melalui tindakan dan pemikirannya guna memahami makna yang disusun oleh subjek. Ketiga, Penelitian ini dilakukan untuk melihat fenomena penerapan Akuntabilitas Keuangan di Gereja Protestan sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan untuk menemukan konsep Akuntabilitas Spiritual, Kepemimpinan, dan Keuangan (Randa, 2010).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Gereja harus memiliki akuntabilitas sehingga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya akuntabilitas keuangan oleh gereja kepada umat dalam melaporkan keadaan keuangan. Dengan adanya akuntabilitas yang jelas akan memberikan keuntungan kepada gereja, sebab ketika gereja transparan dalam melaporkan keadaan keuangan, ketika keuangan gereja memburuk umat akan melakukan perencanaan keuangan secara pribadi untuk meningkatkan keuangan gereja, dan ketika keadaan keuangan membaik maka umat akan turut serta berpartisipasi untuk menciptakan ide atau gagasan penciptaan aktivitas-aktivitas berkualitas untuk gereja. Hal ini mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Gereja Protestan (Studi Fenomenologi di Gereja GBKP Perumnas Simalingkar)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akuntabilitas Majelis Jemaat terhadap aspek keuangan pada organisasi Gereja?
2. Apakah akuntabilitas keuangan dapat meningkatkan kepercayaan jemaat kepada pemegang keuangan Gereja?
3. Apakah organisasi gereja memiliki tim khusus untuk mengaudit Laporan Keuangan?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditetapkan maka penelitian difokuskan untuk melihat bagaimana akuntabilitas Majelis Jemaat Gereja terhadap aktivitas gereja dilihat dari aspek keuangan pada Gereja GBKP Perumnas Simalingkar Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan akuntabilitas Majelis Jemaat terhadap aktivitas gereja dilihat dari aspek keuangan pada Gereja GBKP Perumnas Simalingkar Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut yaitu:

1. Bagi Gereja

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan gereja sehingga dapat meningkatkan loyalitas umat dan meningkatkan partisipasi umat melalui keikutsertaan menyumbang ide atau gagasan untuk meningkatkan keuangan gereja dan menciptakan program-program gereja yang berkualitas sehingga fungsi gereja sebagai penyambung tangan Tuhan akan optimal.

2. Bagi Jemaat

Penelitian ini dapat meningkatkan loyalitas umat kepada gereja dengan cara ikut berpartisipasi dalam meningkatkan keuangan gereja dan pengelolaan keuangan gereja melalui penciptaan program-program berkualitas.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian akuntansi bidang keuangan gereja.